



**Judul** : Potensi ekspor besar: tanaman kratom tak punya regulasi jelas  
**Tanggal** : Kamis, 13 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 10

## Potensi Ekspor Besar Tanaman Kratom Tak Punya Regulasi Jelas

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Eva Monalisa mendorong tanaman kratom menjadi komoditas strategis nasional. Pemerintah diminta menyiapkan aturan jelas agar Indonesia tidak kehilangan potensi besar dari tanaman khas daerah bernilai ekonomi tinggi ini.

Eva mengingatkan agar Pemerintah tidak terlambat mengakui nilai strategis tanaman tersebut. "Karena sudah banyak ciri khas kita yang dipatenkan luar negeri, dan setelah itu kita baru bergerak," ujar Eva dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, kratom memiliki potensi ekonomi besar, tapi para pelaku usaha belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Meski menghasilkan devisa besar buat negara, tapi pajak produk ini belum jelas dan pelakunya masih berada di wilayah abu-abu.

Selanjutnya, politikus PKB itu mengusulkan agar pembahasan regulasi kratom melibatkan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum. "Saya melihat kratom ini juga masuk ke wilayah medis," tambahnya.

Selain itu, isu kratom berkaitan erat dengan penguatan daya saing industri nasional. "Kami sedang membentuk Panja Daya Saing Industri, dan kratom bisa saja jadi bagian dari upaya memperkuat sektor itu," tandas anggota Komisi VII DPR itu.

Wakil Ketua Baleg DPR

Ahmad Doli Kurnia menambahkan, perlu ada pendalaman terhadap potensi tanaman kratom sebagai komoditas strategis nasional. Kratom ini baru mencuat belakangan ini, padahal tanaman tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah menembus pasar internasional.

"Kita perlu tahu kenapa kratom ini tidak diketahui oleh kita semua. Apa karena hanya tumbuh di Kalimantan, atau memang ada kendala tertentu?" ujar Doli.

Menurutnya, kratom yang mampu bertahan tanpa dukungan regulasi selama ini menunjukkan potensi besar di sektor komoditas. Karena itu, DPR melalui Baleg akan mendalami posisi kratom dalam konteks pembahasan RUU Komoditas Strategis agar memiliki landasan hukum yang kuat dan arah pengembangan yang jelas.

"Kalau memang bisa bertahan sampai sekarang karena dikerjakan secara mandiri dan punya akses ke pasar internasional, ini jadi informasi penting buat kami," lanjut Legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Doli menjelaskan, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR juga tengah menyiapkan pembahasan RUU tentang Komoditas Khas. Ia menilai perlu ada perbedaan yang tegas antara komoditas strategis dan komoditas khas agar kebijakan pengembangannya tepat sasaran.

"Misalnya seperti sukun di Pulau Seribu atau kopi Gayo di Aceh, itu punya kekhasan masing-masing. Tapi nanti harus kita perdalam lagi," terangnya. ■ **PVB**